

## Relevansi Agama Dalam Demokrasi Masa Ini

**Hendro Setiawan<sup>1</sup>, Sokhinafao Daely<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Teologi Sriwijaya  
E-mail Korespondensi: hdrsetiawan@yahoo.co.id

**Abstract:** *Democracy that was once considered the best political system created by humans, now its image is fading. The picture of democracy today is getting bleaker. Societal polarization, conflict, the politicization of religion, excessive fanaticism, violence, victims, and various other negative phenomena, seem to have integrated into today's democratic practices. The election that should be a Democratic Party, a people's sovereignty party, has become a frightening and worrying moment. Even though today's world really needs political policies that are able to overcome various complicated problems such as: environmental damage, injustice, pandemics, etc. And in fact, democracy is the political system used by the majority of the world's countries today. What will happen to the world if democracy loses its ability to produce the common good (bonum commune)? What if democracy only becomes a tool for elite groups? And it is detrimental to many people? And what is also important to study, what is the role of religion in this concern? Secularization, which separated religion from politics in the past, has limited religion in the private sphere and politics in the public sphere. This situation is slowly turning into a vicious circle. The grim picture of politics is increasingly driving religion away from him. Even though, religion is a moral agent that is needed as a guide for good politics. The distancing of religion makes politics even more bleak, and so on. Given the urgency of this situation, this research was conducted. The research is aimed at finding alternative solutions that can stop this vicious circle. The research was conducted through a literature study, by tracing the situation of democracy and religion at this time. The religious approach used in this study is a Christian religious approach. The thesis of this research is that religion, which is professed by the majority of the world's population today, is actually an antidote to the gloomy picture of today's democracy.*

**Keywords:** *Democracy, politics, religion, the common good..*

**Abstrak:** Demokrasi yang pernah dianggap sebagai sistem politik terbaik ciptaan manusia, kini citranya memudar. Gambaran demokrasi masa ini makin suram. Polarisasi masyarakat, konflik, politisasi agama, fanatisme berlebihan, kekerasan, jatuhnya korban, dan berbagai fenomena negatif lain, seakan telah menyatu dalam praktek demokrasi masa ini. Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi, pesta kedaulatan rakyat, telah menjadi momen yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Padahal dunia masa ini sangat membutuhkan kebijakan-kebijakan politik yang mampu mengatasi berbagai permasalahan pelik seperti: kerusakan lingkungan, ketidak-adilan, pandemi, dan lain-lain. Faktanya, demokrasi adalah sistem politik yang digunakan oleh mayoritas negara dunia masa ini. Apa yang akan terjadi bagi dunia, apabila demokrasi kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan kebaikan umum (bonum commune)? Bagaimana kalau demokrasi hanya menjadi alat bagi kelompok-kelompok elit belaka? Dan justru merugikan rakyat banyak? Dan yang juga penting dikaji, apa peran agama bagi permasalahan ini? Sekularisasi yang memisahkan agama dengan politik di masa lalu, telah membatasi agama di ranah privat dan politik di ranah publik. Situasi ini perlahan berubah menjadi lingkaran setan. Gambaran suram politik makin membuat agama menjauh darinya. Padahal Agama adalah agen moral yang diperlukan sebagai penuntun arah baik politik. Menjauhnya agama membuat politik makin suram lagi, dan demikian seterusnya. Mengingat gentingnya situasi inilah, penelitian ini dilakukan. Penelitian ditujukan untuk mencari alternatif solusi yang mampu menghentikan lingkaran setan itu. Penelitian dilakukan lewat studi kepustakaan, dengan menelusuri situasi demokrasi dan agama pada masa ini. Pendekatan agama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan agama Kristiani. Tesis penelitian ini adalah bahwa agama, yang dianut oleh mayoritas penduduk dunia masa ini, sejatinya adalah penawar atas gambaran suram demokrasi masa ini.

**Kata kunci:** Demokrasi, politik, agama, kebaikan umum.

Article History

Submitted: 12 Juni 2024	Revised: 14 Juli 2024	Accepted: 25 Juli 2024
-------------------------	-----------------------	------------------------

## PENDAHULUAN

Demokrasi telah dianggap sebagai sistem politik yang terbaik di dunia, dan dianut oleh mayoritas negara. Pada tahun 1970, hanya ada 35 negara yang menganut sistem demokrasi, tetapi tiga puluh tahun kemudian, ada 120 negara yang menganutnya. Tetapi pada masa ini, demokrasi justru seakan kehilangan kebaikannya. Berbagai kelemahan demokrasi muncul. Demokrasi yang seharusnya mewujudkan solidaritas umat manusia, nyatanya keberadaan ekspansi pasar justru merusak solidaritas. Egoisme ekonomi menjadi penghalang solidaritas. Demokrasi yang seharusnya melindungi pluralitas, nyatanya justru berusaha menyeragamkan semua budaya dengan standar budaya maju yang berkuasa. Ini dilakukan demi memudahkan dan melancarkan dominasi ekonomi. Budaya, kearifan, dan tradisi lokal, dihilangkan dengan penyeragaman ini. Demokrasi yang seharusnya mewujudkan kesetaraan, nyatanya justru memproduksi ketidaksetaraan terbesar yang pernah dialami umat manusia. Demokrasi yang seharusnya mewujudkan kedaulatan rakyat, nyatanya justru melanggengkan penguasaan oleh segelintir orang super kaya, yang sejak zaman Aristoteles disebut "*oligarki*". (Hardiman, 2013) Penelitian ini menunjukkan bahwa apa yang kurang, atau membuat demokrasi melemah, adalah hilangnya nilai-nilai moral, yang bersumber pada agama. Karena itu, demi memperbaiki demokrasi, agama harus lebih berperan lagi untuk mempromosikan nilai-nilai moral yang menjadi kekayaan ajaran imannya, ditengah kehidupan berbangsa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode studi kepustakaan atas hal-hal yang menyebabkan melemahnya demokrasi di masa ini. Kemudian dilakukan metode yang sama, untuk membuktikan relevansi agama dalam rangka mengatasi kelemahan demokrasi masa ini. Pendekatan agama menggunakan agama Kristen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang

Untuk memahami permasalahan demokrasi masa ini, perlu dilihat perjalanan pembentukan demokrasi itu sendiri. Apa saja postulat dasarnya, dan apa situasi yang harus ada, supaya demokrasi dapat berjalan baik. Kebutuhan manusia akan politik sudah disadari sejak lebih dari dua ribu tahun lalu. Aristoteles (384 – 322 SM) menyebut manusia sebagai “*zoon politikon*”, (Herry-Priyono, 2022) atau makhluk yang punya kekhasan khusus dengan kemampuannya berpolitik. Kata “politik” sendiri berakar dari kata Yunani “*polis*”, (Herry-Priyono, 2022) yang terkait dengan tata pemerintahan dalam kumpulan hidup bersama. Sejak sebelum masehi manusia telah menyadari bahwa mereka terlahir untuk hidup bersama dalam satu kelompok, dan supaya semua baik, dibutuhkan suatu tata pemerintahan. Politik telah melekat dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala.

Politik berkembang seiring perkembangan manusia itu sendiri. Politik dikembangkan dan dibentuk dalam konteks historis. (Herry-Priyono, 2022) Politik selalu bersifat dinamis, selalu berubah, dan dibentuk oleh zamannya. Ada masanya politik dianggap sebagai sesuatu yang sangat positif (pembawa kebaikan), dan sebaliknya pula, sebagai yang negatif (produk rezim, dst). Ada masanya politik bersifat horisontal dengan ciri kesetaraan seperti demokrasi, sebaliknya ada masa dengan sifat vertikal seperti sistem monarki dengan raja sebagai “*wakil tuhan di dunia*”. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa politik secara dinamis mampu membawa kebaikan, dan sebaliknya juga, keburukan, bagi para warganya.

Sifat dinamis politik inilah yang menyebabkan manusia perlu terus menerus memikirkan dan mengembangkan sistem politik. Ini terutama karena kehidupan bersama mutlak membutuhkan suatu tata pemerintahan, tidak ada cara lain. Dengan demikian, refleksi atas politik dibutuhkan sepanjang zaman, demi menjaga politik senantiasa berpihak pada kebaikan bersama. Filsafat politik terus dikembangkan dengan tujuan itu. Berbeda dengan kebenaran ilmu pengetahuan, kebenaran filsafat perlu terus menerus dibaharui dan diceraikan lewat pemikiran kritis. (Herry-Priyono, 2022) Tidak ada sistem politik yang mutlak baik atau mutlak buruk, yang ada hanyalah yang terbaik dari yang ada (atau terbaik dari yang buruk). Sayangnya, refleksi atas politik yang dulunya menjadi bagian dari kehidupan seluruh masyarakat, perlahan berubah menjadi ranah para politikus dan segelintir orang saja. Ini disebabkan oleh perkembangan kompleksitas politik, yang makin sulit dijangkau

pemahaman masyarakat luas. Dan juga adanya upaya dari sedikit orang berkuasa, yang ingin mengendalikan politik demi kepentingan mereka sendiri.

Demokrasi, sebagai sistem politik yang muncul sekitar abad ke tujuh belas, pernah dianggap sebagai sistem politik terhebat yang lahir dari pemikiran manusia. Demokrasi pada masa itu, secara masif menggantikan sistem monarki (kerajaan) yang telah lama digunakan. Munculnya sistem politik demokrasi, tidak terlepas dari hasil refleksi para filsuf politik abad ke 17. Thomas Hobbes (1588-1679), berangkat dari pengandaianya (kondisi asali), bahwa manusia itu pada dasarnya “*selalu menginginkan lebih dan tak pernah terpuaskan*”. Dan mengingat sumber daya dunia ini bersifat terbatas atau langka, maka manusia selalu dalam kondisi berperang melawan yang lainnya. Dalam konteks inilah muncul ungkapan “*manusia adalah srigala bagi sesamanya*” (*homo homini lupus*). (Herry-Priyono, 2022) Untuk mencegah itu, dibutuhkan negara yang mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengendalikan para warganya dari perang satu sama lain. John Locke (1632-1704), secara berbeda dengan Hobbes, melihat ditemukannya “*uang*” pada masa itu, telah memicu keserakahan manusia untuk mengejar akumulasi harta. Inilah yang menjadi sumber pertikaian, akibat saling berebut kepemilikan. Untuk mengatasi hal itu, dibutuhkan negara yang tujuan utama adalah “*menjamin kepemilikan*”. (Herry-Priyono, 2022) Supaya manusia tidak bisa merebut apa yang sudah menjadi milik sesamanya. Jean Jaques Rousseau (1712-1778) melihat sumber konflik muncul dari “*modernitas yang memicu panggung kompetisi reputasi, kekayaan, penghormatan, dll*”. Situasi baru yang mengubah dunia yang tadinya damai, menjadi ajang kompetisi. Dalam kondisi ini, orang kaya yang memiliki sumber daya lebih punya kemampuan mengatur orang yang lemah. Akibatnya, hukum cenderung akan “*membelenggu yang lemah*”. (Herry-Priyono, 2022) Karena itu, Rousseau mengusulkan demokrasi langsung sebagai pemerintahan yang dipilih dan dikendalikan oleh rakyat, untuk melayani rakyat.

Ungkapan “*pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*”, yang menunjukkan arti demokrasi, pertama-tama diungkapkan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, tahun 1863 dalam pidatonya di makam serdadu Gettysburg, Pennsylvania. (Herry-Priyono, 2022) Pengalaman akan kekejaman para diktator tirani yang menyulitkan hidup rakyat di masa lalu, membuat sistem politik demokrasi disukai dan berkembang pesat di banyak negara. Apalagi ketika komunisme yang menjadi saingan kuatnya, runtuh di beberapa tempat. Demokrasi yang mampu

menjamin keberagaman, kebebasan individu, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi telah dianggap sebagai puncak kebaikan sistem politik di abad 19. Ilmuwan politik Russel Hanson menyatakan bahwa pada akhir abad 19 demokrasi telah menjadi: *“konsep tanpa tandingan dalam politik modern dan dalam sejarah politik”*.(Herry-Priyono, 2022) Francis Fukuyama menerbitkan buku berjudul *“The End of History”* tahun 1989, yang menggambarkan sistem demokrasi sebagai *“sistem terbaik yang tidak akan bisa diperbaiki lagi dalam sejarah”*.(Fukuyama, 2020) Demokrasi berkembang pesat di seluruh dunia pada masa itu. Pada tahun 1970 hanya ada sekitar 35 negara yang menggunakan sistem politik demokrasi di dunia, angka ini meningkat drastis menjadi 120 negara pada tahun 2020.(Fukuyama, 2020) Demokrasi dipercaya mampu menurunkan angka kemiskinan dunia secara signifikan. Jumlah kemiskinan ekstrem di negara-negara berkembang penganut demokrasi turun dari 42% populasi pada tahun 1993, menjadi 17% di tahun 2011. Prosentase anak yang meninggal sebelum usia lima tahun turun dari 22 % di tahun 1960, menjadi kurang dari 5% di tahun 2016.(Fukuyama, 2020)

Ada beberapa hal yang membuat demokrasi dipandang lebih baik (bahkan paling baik) daripada sistem-sistem politik lainnya, antara lain: a. kemampuan mencegah kediktatoran, b. kemampuan menjamin sejumlah hak dasar warganya, yang tidak dapat dipenuhi sistem lainnya, c. kemampuan menyediakan rentang kebebasan yang lebih luas, d. kemampuan membantu orang melindungi kepentingan dasar mereka sendiri, e. kemampuan menyediakan kesempatan besar bagi warga untuk melaksanakan daya penentuan diri (aktualisasi diri), f. kemampuan menyediakan keleluasaan lebih luas bagi pengembangan diri warga, g. fakta bahwa pemerintahan demokrasi modern tidak ditemukan berperang satu sama lain, h. fakta bahwa negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi dikenal lebih sejahtera dibanding yang menggunakan sistem lainnya.(Herry-Priyono, 2022) Sampai saat ini, belum ada sistem politik lain yang dinilai lebih baik dari sistem demokrasi.

Abad ke 19 telah menjadi puncak kejayaan demokrasi. Sistem politik demokrasi dipandang terbukti memproduksi hal-hal baik yang dibutuhkan masyarakat luas. Semua pihak mengagung-agungkan demokrasi. Bahkan para diktator dan junta militer, yang mempraktikkan yang bertentangan dengan demokrasipun, meneriakkan slogan demokrasi. Sejarawan politik Samuel Finer memberi contoh: diktator Francisco Franco di Spanyol menyebut rezimnya *“organic democracy”*, Jendral Ayub Khan di Pakistan menyebut rezimnya *“basic democracy”*,

Gamal A. Nasser di Mesir menyebut rezimnya “*presidential democracy*”, Alfredo Stroessner di Paraguay menamakan rezimnya “*selective democracy*”, Rafael Trujillo di Dominika menyebut rezimnya “*neodemocracy*”.(Herry-Priyono, 2022)

Sayangnya, sejak pertengahan abad ke 20, demokrasi mulai jatuh dalam resesi. “*Resesi demokrasi*”(Hardiman, 2018), menjadi topik bahasan politik di seluruh dunia. Demokrasi dituduh menghasilkan efek samping berupa kesenjangan sosial yang parah. Demokrasi dinilai tidak memadai dalam mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan, pandemi, dll. Negara-negara yang lebih otoriter dipandang lebih mampu menangani pandemi Covid 19 lebih efektif, daripada negara-negara demokrasi.(Zizek, 2020) Demokrasi yang hendak mempromosikan rasionalitas manusia, ternyata justru memicu sentimentalitas berlebihan yang berdampak pada polarisasi masyarakat atas nama agama.(Hardiman, 2018) Konflik horisontal, kerusuhan, politisasi agama, dan berbagai fenomena negatif lain, seakan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik demokrasi. Demokrasi masa ini seakan kehilangan kemampuannya memproduksi yang baik, bahkan sebaliknya, memproduksi hal-hal yang buruk. Francis Fukuyama, filsuf politik USA, yang tadinya menyebut demokrasi sebagai “*The End of History*”, mengakui bahwa dulu ia “*tak menyangka atau tak punya teori bagaimana demokrasi bisa berjalan mundur*”.(Hardiman, 2018) Sejarawan Perancis, Francois Furet, menyatakan: “*bahkan ketika demokrasi bergerak maju, demokrasi yang sama membawa kita pada perasaan frustrasi lebih dalam*”.(Herry-Priyono, 2022)

### **Permasalahan Demokrasi Masa Kini**

Apa yang menyebabkan demokrasi masa kini kian terpuruk? Pertanyaan ini sangat relevan mengingat mayoritas manusia di dunia masa ini hidup dengan sistem ini, dan belum ada alternatif sistem politik lain yang dinilai lebih baik. Untuk memahami akar permasalahan, perlu dimengerti bahwa inti kekuatan sistem demokrasi terletak pada “*kedaulatan rakyat*”.(Magnis-Suseno, 1987) Rakyat diandaikan sebagai kekuatan utama yang mampu mengarahkan tata pemerintahan pada kebaikan bersama yang luas. Ada dua pengandaian yang sangat mendasar dibalik ini, yaitu: 1. Rakyat punya kapasitas memilih secara benar bagi “*kebaikan umum*”, bukan sekadar memilih menurut selera pribadi, dan 2. Rata-rata warga digerakkan motif memilih “*kebaikan umum*”.(Herry-Priyono, 2022) Kemampuan rakyat mengarahkan demokrasi pada pada “*kebaikan umum*” (*bonum commune*)

ternyata adalah syarat utama bagi munculnya kebaikan demokrasi. Kalau syarat ini terpenuhi, maka demokrasi bergerak kearah kebaikan. Dan sebaliknya pula, kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka demokrasi akan gagal memproduksi kebaikan.

Mengapa fokus masyarakat umum pada "*kebaikan umum*", yang menjadi syarat penentu kebaikan demokrasi, pada masa ini terdistorsi? Ada beberapa hal yang secara akumulatif telah mempengaruhi, yaitu:

### **1. Kesenjangan sosial yang semakin tajam**

Fakta paling mengejutkan di masa ini adalah terciptanya masyarakat yang paling tidak setara (tidak adil) sepanjang sejarah manusia.(Harari, 2018) Walaupun kehidupan secara umum telah berkembang baik, dimana kelaparan dan peperangan telah jauh berkurang. Namun masalah ketidakadilan sosial menjadi telah menjadi isu penting masa ini di seluruh dunia. Kesenjangan sosial terjadi secara masif, baik pada level antar negara, maupun antar individu. Ketidakadilan ekonomi tergambar dalam data statistik dunia tahun 2018, dimana: 1% penduduk dunia menguasai 45% kekayaan dunia, 9% menguasai 39%, 26% menguasai 14%, dan "*mayoritas 64% hanya menguasai 2% kekayaan dunia*".(Herry-Priyono, 2022) Beberapa orang hidup dengan kekayaan berlebihan, sementara banyak orang kelaparan. Bedasar data World Bank tahun 2015, 767 juta orang menderita kemiskinan akut dan 2,66 juta anak meninggal karena kelaparan setiap tahun diseluruh dunia (atau sekitar lima anak meninggal akibat kelaparan setiap menitnya).(Herry-Priyono, 2022) Penyebab utama kesenjangan adalah ketidakadilan atas akses terhadap sumber-sumber kemakmuran. Hanya "*segelintir elit*" yang menikmati kekayaan dunia, sementara mayoritas yang lain mengalami ketidakadilan.

Ketidak-adilan adalah kondisi yang melemahkan kepercayaan masyarakat pada sistem politik demokrasi. Akibatnya, dukungan terhadap demokrasi cenderung menurun dan memunculkan banyak permasalahan sosial. Bahkan Amerika Serikat sebagai negara asal dan promotor utama demokrasi juga mengalami hal ini. Dalam periode 1980-2010 (30 tahun), rata-rata pendapatan 50% populasi Amerika yang menengah kebawah terbukti stagnan atau malah menurun,(Mahbubani, 2020) sementara sisanya makin kaya. Kesenjangan ini memicu gelombang "*sea of despair*"(Mahbubani, 2020) (lautan keputusasaan) ditengah masyarakat menengah kebawah, yang memicu pada kemerosotan sosial, anarki, konflik horisontal, depresi, dan lain sebagainya. Mayoritas masyarakat yang mengalami ketidakadilan tidak lagi mempercayai kebaikan demokrasi. Tetapi karena tidak ada pilihan sistem lain,

mereka terpaksa tetap menjalani dengan hanya memilih yang disukai, atau memberi harapan bagi kepentingannya, bukan lagi berfokus pada “*kebaikan umum*” (*bonum commune*). Ini fenomena yang terjadi di banyak negara demokrasi dunia. Kondisi ini mendorong situasi dimana politik dengan mudah dikendalikan oleh para elit yang mampu memberi harapan pada masyarakat yang putus asa (populisme), bukan yang mampu menghadirkan “*kebaikan umum*”. Populisme telah tumbuh diseluruh dunia dipicu situasi ini.

Negarawan Indonesia, Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, menyatakan bahwa ketidakadilan sosial sebagai bentuk kegagalan negara dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaannya, adalah salah satu penyebab munculnya gerakan fundamentalisme agama di Indonesia.(Wahid, 2014) Maarif menyatakan bahaya fundamentalisme dengan: “*bencana dapat terjadi apabila pemeluk agama kehilangan daya nalar, kemudian menghakimi yang tidak sepaham*”.(Wahid, 2014) Masyarakat yang putus asa karena ketidakadilan sosial, dengan mudah jatuh dalam paham yang dipromosikan oleh pihak-pihak yang memiliki agenda tersembunyi. Paham-paham radikal yang menggunakan agama sebagai alat politik, dapat mengubah wajah agama menjadi beringas, agresif, intoleran, dan penuh kebencian.(Wahid, 2014) Ini juga terjadi di Indonesia dan menyebabkan pada tahun 2012 The New York Times mempublikasikan artikel yang berjudul “*Indonesia’s Rising Religious Intolerance*”. Artikel ini menggambarkan kecenderungan Indonesia sebagai negara yang tadinya plural, damai, toleran, berubah pada situasi intoleransi yang memprihatinkan. Survey yang dilakukan The Wahid Foundation, telah mengkonfirmasi kebenaran hal ini.(Amin Mudzakir, 2018) Ketidakadilan nyata telah mereduksi daya nalar masyarakat untuk memilih “*kebaikan umum/bersama*”, dan menggantinya dengan pilihan atas “*kebaikan diri/kelompok*” yang sempit. Perjuangan berdasarkan tujuan kebaikan sempit kelompok radikal, mencederai kemampuan demokrasi untuk menghasilkan kebaikan bersama.

## **2. Menguatnya keberagaman**

Dunia masa ini adalah dunia yang beragam dalam semua bidang seperti: kultural, agama, pengetahuan, cara pikir, dll. Kehidupan manusia masa lalu yang cenderung homogen, telah berubah drastis menjadi kehidupan ditengah keberagaman atas segala sesuatu. Kemajuan teknologi transportasi telah memindahkan banyak orang dari seluruh dunia ke tempat hidup yang baru dan memicu keragaman kultural (multikulturalisme) ditempat itu. Migrasi dan misi agama

turut berperan menciptakan keberagaman agama di seluruh dunia. Differensiasi ilmu pengetahuan yang menghasilkan cabang-cabang baru ilmu pengetahuan yang banyak, memicu keberagaman pendidikan dan pengetahuan individu. Pengembangan pesat dunia digital melalui media sosial menguatkan keberagaman cara pandang, cara hidup, dll.

Keberagaman atas segala hal berdampak pada keberagaman cara pikir, cara pandang, dan cara bertindak. Akibatnya, tiap individu seakan punya cara pandang, pikir, dan bertindak sendiri, terhadap segala sesuatu. Sejauh tidak melanggar hukum dan hak orang lain, tiap individu bebas menjalani hidupnya dengan cara apapun. Akibatnya, polarisasi pendapat terjadi dimana-mana. Ada yang setuju aborsi, ada yang menolak. Demikian juga dalam hal-hal seperti: LGBT, euthanasia, dan berbagai kebijakan publik, selalu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Pro dan kontra seakan mewarnai setiap keputusan bersama. Beberapa perbedaan bahkan menyangkut hal-hal yang sangat prinsip dan sulit disatukan. Sikap terhadap isu legalitas perkawinan LGBT misalnya, sangat sulit untuk disatukan pada masa ini karena tiap negara/kelompok punya pendapat berbeda. Situasi ini, selain memicu benturan segala arah dalam masyarakat(OFM, 2014), juga mereduksi kemampuan masyarakat untuk merumuskan "*kebaikan umum/bersama*". Keberagaman berpotensi menggeser kemampuan dan fokus masyarakat luas dari "*kebaikan umum*", menjadi "*kebaikan diri sendiri atau kelompok*".

### **3. Dampak negatif perkembangan dunia digital**

Pada masa ini dunia telah mencapai kemajuan teknologi pada tingkat revolusi Industri 4.0. Kehidupan dan proses produksi pada masa ini dicirikan penggunaan luas teknologi robotik dan jaringan internet(Kelly, 2019) Maraknya penggunaan internet atau digitalisasi pada hidup manusia, telah diperkuat oleh situasi pandemi covid 19. Faktanya, pandemi telah menaikkan 49 % transaksi belanja digital dalam 1 tahun terakhir.(Baur, 2021) Menurut data statistik tahun 2021, dari 7,83 miliar penduduk dunia, terdapat 8,22 miliar telepon genggam aktif, dengan 4, 66 miliar pengguna internet, dan 4,20 miliar pengguna aktif media sosial di dunia. Indonesia dengan 274,9 juta penduduk, beredar 345,3 juta telepon genggam, dan 202,6 juta koneksi internet.(Baur, 2021) Ini berarti bahwa 73,7 % penduduk Indonesia sudah menjadi pengguna internet, dengan 61,8 % diantaranya pengguna aktif media sosial.(Baur, 2021) 170 juta penduduk diantaranya adalah peselancar aktif dengan berbagai platform media sosial selama 8 jam 52 menit per hari!(Baur, 2021)

Kehadiran dunia maya sudah menjadi bagian tak terpisahkan kehidupan manusia saat ini.

Kehadiran teknologi digital tentu punya banyak pengaruh positif dalam kehidupan manusia, tetapi ada juga pengaruh negatif yang perlu diantisipasi. Beberapa dampak negatif bahkan melemahkan demokrasi, antara lain:

a. Hoaks atau “*Post Truth*”

Istilah “*post truth*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai “*pasca kebenaran*”, yang menggambarkan fenomena dekade terakhir berupa munculnya masyarakat yang “*menolak kebenaran*”. Pada tahun 2016, *Oxford Dictionaries* bahkan telah memberikan julukan “*Word of The Year*” pada kata “*post truth*”. (Flood, 2016) Fenomena “*post truth*” muncul pertama-tama lewat perilaku politik yang mendorong masyarakat lebih mengutamakan eksploitasi emosi, dan menolak fakta-fakta. Fenomena “*post truth*” kemudian meluas dari politik ke bidang-bidang lain kehidupan manusia.

Banjir informasi dan ketidaksiapan mayoritas manusia untuk memilah informasi, membuka kesempatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk menggunakan penyebaran informasi sebagai sarana untuk mencapai kepentingan diri. Mereka memanipulasi masyarakat dengan: *hoax* dan konstruksi pikiran. Konstruksi atau manipulasi pemikiran sulit dikenali, karena juga mencampurkan fakta dan kebenaran didalamnya. Fakta dan kebenaran dipelintir sedemikian rupa dalam logika dan bentuk psikologis yang memanipulasi, dan mudah diterima masyarakat umum sebagai suatu kebenaran. “*Buzzer*” atau pendengung, adalah istilah baru untuk organisasi atau individu yang melakukan konstruksi pemikiran lewat media sosial dengan tujuan tertentu, atau sesuai pesanan. Beberapa *buzzer* masa ini mampu menggunakan kemampuan psikologi masa yang canggih untuk masuk dalam pemikiran masyarakat. Adanya hoaks dan *post truth* jelas melemahkan kemampuan masyarakat untuk mengarahkan demokrasi kearah “*kebaikan umum*”. Sebaliknya masyarakat digiring untuk mendukung “*kepentingan elit*” yang bermain lewat media informasi.

b. Fenomena “*epistemic bubbles*” dan “*echo chambers*”

Istilah “*epistemic bubbles*” dan “*echo chambers*” diperkenalkan profesor dari University of Utah Amerika Serikat yang bernama C. Thi Nguyen. “*Epistemic bubbles*” atau gelembung epistemik, dimengerti sebagai terbentuknya cara berpikir

atau kebenaran kelompok, yang sempit, dan tidak sesuai dengan realitas. Seakan-akan pemikiran berkembang hanya dalam lingkup “*gelembung yang sempit*”. Kompleksitas dunia dan banjir informasi media sosial yang membingungkan, membuat orang memilih berelasi hanya dengan kelompok yang sepaham. Kelompok ini kemudian memilih informasi yang sesuai atau hanya yang berasal dari lingkup sendiri, untuk dikonsumsi. Akibatnya, mereka menciptakan realitas sendiri, yang sebenarnya tidak sesuai dengan realitas seutuhnya. Filsuf Perancis Jean Baudrillard menunjuk fenomena ini dengan istilah: “*hiperrealitas*”. Hiperrealitas adalah situasi dimana manusia sudah tidak dapat lagi membedakan antara yang realitas nyata dan yang imajinasi. Realitas dan imajinasi tercampur aduk. Ini menyebabkan pemikiran masyarakat masa ini mudah sekali dimanipulasi.(Haryatmoko, 2016) Hal ini diperparah fenomena “*echo chambers*” (ruang gema), dimana dalam kelompok yang sudah terisolasi *epistemic bubbles*, itu ada upaya dari pembuat opini untuk merusak atau menolak suara-suara yang berbeda.(Pr, 2022) “*epistemic bubbles*” dan “*echo chambers*”, menyempitkan wawasan dan menjauhkan manusia dari realitas nyata. Sejarawan Inggris, Daniel Boorstin menjelaskan dengan: “*kebenaran sudah digantikan dengan yang bisa dipercaya*”.(Pr, 2022) James Ball dengan: “*orang menjadi lebih mudah memercayai yang belum tentu benar tetapi memenuhi emosional mereka*”.(Pr, 2022) Kesesatan berpikir yang diakibatkan kesempitan informasi semacam ini, menjauhkan melemahkan kemampuan manusia untuk merumuskan “*kebaikan umum*”. Sayangnya, fenomena *epistemic bubbles* sudah menjadi fenomena umum dalam masyarakat masa ini. Ini buruk bagi demokrasi.

#### **4. Daya “veto” kekuatan finansial dan kekuatan internasional.**

Beberapa dekade terakhir telah menunjukkan betapa naif keyakinan bahwa pasar dianggap mampu mandiri, bebas dari etika apapun.(KWI, 2020) Faktanya ada kekuatan-kekuatan besar, yang demi kepentingannya sendiri, telah mengendalikan politik demokrasi lewat konstruksi opini masyarakat. Kekuatan besar finansial itu bahkan mampu menerobos batas-batas politik dan negara. Terbongkarnya skandal *Cambridge Analytica* tahun 2017, dimana *facebook* telah diketahui mengambil data penggunanya untuk memanipulasi proses pemilu di banyak negara diseluruh dunia,(Harari, 2018) telah membuktikan hal ini. Pembentukan opini untuk kepentingan elit yang berkuasa, jelas melemahkan demokrasi yang mengandalkan kemampuan masyarakat untuk berpihak pada “*kebaikan umum/bersama*”. Demokrasi dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan elit semata.

## 5. *Politik Identitas*

Francis Fukuyama yang tadinya mempromosikan sistem demokrasi sebagai “*The End Of Hystory*”, berubah pikiran ketika melihat kenyataan: “*lembaga-lembaga Amerika sedang membusuk, karena negara terperangkap oleh kelompok-kelompok kepentingan yang kuat dan terkunci dalam struktur kaku yang tidak dapat mereformasi dirinya sendiri*”.(Fukuyama, 2020) Francis melihat ada masalah besar dalam demokrasi masa ini, yang dulunya tidak terprediksi. Dalam bukunya “*Identity: The Demand for Dignity and The Politics of Resentment*”, yang terbit tahun 2018, Fukuyama menjelaskan apa yang dianggapnya sebagai latar belakang suramnya demokrasi masa ini.

Menurut Francis, pertumbuhan luar biasa “*keinginan manusia untuk diakui sebagai unggul*”(megalothymia)(Fukuyama, 2020) pada masa ini, adalah tantangan utama demokrasi masa ini. Pertumbuhan luar biasa keinginan untuk dihargai ini dipicu oleh situasi kebebasan, tumbuhnya perasaan ketidakbermaknaan hidup, perasaan terpinggirkan, dll, yang merupakan buah dari modernitas. Kebingungan tentang identitas muncul sebagai kondisi hidup di dunia modern yang penuh disrupsi, perubahan, keragaman, dan berbagai tawaran yang disediakan. Iklim kompetisi kapitalisme telah membuat hanya segelintir pemenang di semua bidang kehidupan yang dianggap sukses, dan sisanya adalah pecundang dan orang yang tersingkir, tak berguna, dan terpinggirkan. Akibatnya, “*tuntutan akan pengakuan identitas*” menjadi konsep utama yang melatarbelakangi banyak hal yang terjadi dalam politik masa ini.(Fukuyama, 2020)

Banyak pemimpin politik telah menggerakkan para pengikutnya secara efektif, dengan cara: membuat persepsi bahwa mereka sudah dihina, diremehkan, bahkan diabaikan.(Fukuyama, 2020) Presiden Rusia, Vladimir Putih, terus mengeluhkan penghinaan oleh NATO yang merangsek mendekati perbatasan negaranya.(Fukuyama, 2020) Perdana menteri Hongaria, Viktor Orban menyatakan “*Kami orang Hongaria juga memutuskan bahwa kami ingin mendapatkan kembali negara kami, harga diri kami, dan masa depan kami*”.(Fukuyama, 2020) Donald Trump dengan slogannya: “*membuat Amerika hebat lagi*”. Xi Jin Ping berkali-kali bicara panjang lebar tentang “*100 tahun penghinaan*”.

Francis menunjukkan bahwa setelah semua teori ekonomi berupaya mengarahkan manusia untuk berperilaku rasional, ternyata manusia masa kini justru “*makin tidak rasional*”.(Fukuyama, 2020) Sentimen akan harga diri yang tidak

rasional makin mendominasi. Manusia makin haus akan pengakuan identitas. Situasi keberagaman dan persaingan yang ketat masa ini, menyulitkan manusia untuk mencari identitas lewat prestasi diri sendiri. Prestasi yang membanggakan hanya dapat dicapai segelintir orang hebat. Akibatnya individu-individu yang tidak mendapat pengakuan, mulai mengaitkan harga dirinya dengan kelompok yang lebih besar.(Fukuyama, 2020) Ini melatarbelakangi perkembangan pesat gerakan-gerakan radikal yang mengatas-namakan agama. Agama menjadi pemberi identitas yang kuat, karena dapat diinterpertasikan sebagai umat pilihan yang sedang mengemban kehendak Tuhan. Mereka menggunakan segala cara untuk menguatkan identitas kelompoknya. Francis menunjukkan bahwa pada dasarnya politik identitas dimana-mana merupakan gerakan perjuangan mencari pengakuan atas martabat.(Fukuyama, 2020) Saat ini gerakan politik identitas telah menjadi inti gerakan demokrasi.(Fukuyama, 2020)

Demokrasi dengan politik identitas adalah demokrasi yang “sakit”. Politik identitas hanya memperjuangkan “*martabat kelompoknya*” atau “*kepentingan kelompoknya*” sendiri, bukan “*kebaikan umum/bersama*”. Politik identitas tidak mampu memikirkan kepentingan yang lain sebagai bagian dari kehidupan bersama. Politik identitas mendorong demokrasi menjadi sekadar ajang kompetisi antar kelompok, untuk mencapai kekuasaan demi kepentingan sempitnya. Maka timbullah polarisasi, konflik, politisasi agama, dan praktik demokrasi yang menakutkan banyak orang. Para pemimpin tak bermoral menggunakan fenomena politik identitas untuk menggalang dukungan bagi dirinya. Para pengikut yang telah kehilangan rasionalitasnya, siap dengan fanatik mendukung siapa saja yang menjamin pengakuan atas identitas kelompoknya.

### **Bagaimana Memperbaiki Demokrasi?**

Pembahasan sebelumnya telah menunjukkan situasi kompleks dimana, di satu sisi, dunia sangat membutuhkan kebaikan demokrasi mengingat banyaknya permasalahan yang mendesak, dan belum ada sistem lain yang dinilai lebih baik dari demokrasi. Tetapi di sisi lain, demokrasi justru berangsur kehilangan kemampuannya menghasilkan yang baik. Situasi yang pelik ini tentu perlu segera dicarikan solusi. Ada beberapa alternatif solusi yang dapat dipikirkan:

### **1. Pendidikan politik**

Sebuah kebutuhan mendesak di masa ini, untuk mendidik masyarakat tentang politik secara memadai dan sejak dini. Demokrasi yang berarti kekuasaan rakyat, membutuhkan rakyat yang punya kemampuan memadai dalam politik. Pengetahuan politik bukan hanya untuk segelintir orang yang berkecimpung di dalamnya. Kompleksitas politik masa ini membutuhkan pengetahuan memadai bagi semua anggota rakyat, sang pemilik kedaulatan. Filsuf Michael Foucault (1926-1984), telah menekankan pentingnya membangkitkan pengetahuan masyarakat. Menurutnya, pada masa ini kekuasaan (politik) dipengaruhi kuat oleh hubungan-hubungan dalam masyarakat. Karena itu, yang paling menentukan akan gerak masyarakat adalah kualitas “*pengetahuan individu*”, sebagai pembentuk masyarakat itu sendiri. (Haryatmoko, 2016)

Tanpa pengetahuan yang memadai, kegiatan politik akan tereduksi menjadi soal dukung mendukung calon, yang seiman, sekelompok, sepaham, yang menguntungkan, yang memperkuat identitas, dst. Politik menjadi seakan hanya soal strategi “*mengalahkan lawan*” dalam pemilu. Politik seakan hanya merupakan aktivitas yang perlu saat pemilihan belaka. Para politikus berbondong mendekati lembaga-lembaga masyarakat dan agama menjelang pemilihan, dan menjauh sesudahnya. Aktivitas semacam ini nyata tidak menguatkan demokrasi, bahkan berpotensi melemahkannya. Tidak ada korelasi langsung antara orang yang dipilih berdasarkan kesamaan agama, kelompok, dll, terhadap proses membawa demokrasi pada “*kebaikan umum*”. Bahkan tidak jarang, yang dipilih ternyata tidak membawa nilai-nilai atau harapan yang memilihnya. Contohnya: Presiden USA, Joe Biden, yang beragama katolik, justru adalah tokoh utama yang mempromosikan aborsi. (Indonesia, 2022) Padahal aborsi bertentangan kuat dengan ajaran katolik. Walau tidak dapat digeneralisasi, beberapa contoh lain yang menunjukkan fenomena yang sama. Demokrasi membutuhkan pemahaman dan perjuangan yang integral kearah “*kepentingan umum/bersama*” bagi semua pihak, bukan hanya gerakan sporadis politik praktis menjelang pemilu. Demokrasi butuh untuk direfleksikan, dimonitor, dikritisi, dan dibaharui terus menerus di setiap lintasannya. Demokrasi butuh rakyat yang paham “*cara mengendarainya*”, bukan hanya yang hanya mampu menjadi “*penumpang*”, atau bahkan “*yang dikorbankan*”.

## **2. Mengembangkan dialog**

Ketidakadilan global, keberagaman, politik identitas, *post truth*, *epistemic bubbles*, dll, telah kuat mendorong munculnya sekat-sekat dalam masyarakat. Dialog dapat meruntuhkan sekat-sekat itu. Filsuf Jerman, Jurgen Habermas sangat memahami kebutuhan ini, dan berupaya menyumbangkan pemikiran yang dapat menjamin bahwa semua anggota masyarakat dapat hidup menurut keyakinan, cita-cita, nilai-nilai, dan pandangan dunia masing-masing.(Haryatmoko, 2016) Untuk mencapai tujuannya, Habermas mengusulkan "*Etika Diskursus*", yang memungkinkan semua pihak (termasuk agama), dapat terlibat mengusulkan nilai-nilai moral untuk dipakai dalam kehidupan bersama.(Haryatmoko, 2016) Diskursus disini dapat diterjemahkan dengan proses diskusi yang setara dan dengan prosedur benar, atau ber"deliberasi".

Perlu disadari bahwa dialog (diskursus/deliberasi) tidak berarti menyeragamkan segala sesuatu. Perbedaan prinsip memang mustahil diseragamkan begitu saja. Tetapi dialog pertama-tama membuka sekat wawasan akan cara berpikir, keberatan, dll, dari semua yang ada. Dari wawasan yang telah terbuka, dimungkinkan membangun kesepahaman tentang "*kebaikan umum*". Tentu maksudnya bukan kebaikan sempurna yang mampu memuaskan semua pihak. Tetapi setidaknya kebaikan tertinggi yang dapat dicapai dengan mengakomodasi semaksimal mungkin kepentingan semua pihak.

## **3. Memasukkan nilai moral dalam politik**

Pendidikan politik dan dialog menjadi kewajiban bagi semua pihak terkait seperti: lembaga-lembaga pemerintah, pendidikan, agama, kemasyarakatan, dll. Tetapi kewajiban pendidikan moral utamanya ada pada agama. Negara tidak punya kemampuan untuk menyempurnakan moral individu, negara hanya menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan prasyarat, prasarana dan kondisi yang ada.(Magnis-Suseno, 1987) Filsuf Immanuel Kant (1724-1804), telah mengingatkan bahwa masalah negara tidak dapat dipecahkan hanya dengan akal saja, karena akan menghasilkan yang disebutnya dengan istilah: "*bangsa setan-setan*".(Hardiman, 2018) Setan-setan yang licik, korup, keji, pendusta, akan berkompetisi satu sama lain untuk menjamin tercapainya kepentingan masing-masing. Berbeda dengan setan, manusia seharusnya bermoral, beragama dan berbudaya.(Hardiman, 2018) Kebebasan politik tidak bisa bersifat relativis, butuh

tuntunan moral yang bersifat mutlak dan mendasar.(T. Krispurwana Cahyadi, 2006) Karena itu, dibutuhkan nilai-nilai moral dan religius dalam sistem politik manapun.

Dari tiga alternatif di atas, yang unik adalah, bahwa ketiganya dapat diharapkan perbaikan lewat peran agama. Hanya agama yang mampu melakukan ketiganya. Agama juga dianut oleh mayoritas manusia di dunia. Pengikut ateis yang menolak agama, faktanya hanya bagian kecil dari populasi dunia. Agama mampu berperan dalam pendidikan politik bagi umatnya, membangun dialog dengan agama lain demi menangkai politisasi agama, dan yang terpenting, agama adalah sumber moral yang dibutuhkan untuk membarui demokrasi. Lalu, mengapa peran agama belum nampak konkret dalam mengatasi kemerosotan demokrasi?

### **Relevansi Agama Dalam Kehidupan Demokrasi**

Pada dasarnya, semua pengajaran agama mengandung aspek vertikal dan horisontal. Aspek vertikal mengatur hubungan manusia dengan “*Yang Illahi*”, dan aspek horisontal mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Dengan demikian, dalam konteks hubungan dengan sesama, agama tidak pernah bisa lepas dalam peran menciptakan masyarakat yang baik. Misi “*kedalam*” dan “*keluar*” dalam setiap agama adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Misi keluar dalam agama Islam dikenal semboyan “*rahmatan lil alamin*”, yang berisi panggilan Islam untuk menjadi rahmat bagi seluruh kosmos.(Antonius Siwi Dharma Jati SJ, 2022) Ajaran Kristiani mengingatkan bahwa umat beriman adalah “*garam dan terang*” dunia (Mat 5: 13-14). Confusius mengatakan “*manusia unggul memandang keadilan (Yi) sebagai inti segala hal. Karena itu, manusia harus mengikuti kewajiban2 moral tanpa syarat sebagai implementasi keadilan, tanpa memandang keuntungan diri sendiri*”.(Koller, 2010) Prinsip senada juga diajarkan dalam agama-agama lain. Mengupayakan “*kebaikan umum*” adalah bagian dari cara hidup religius.

Kalau semua agama mengajarkan cara mengupayakan hidup bersama yang baik, dan mayoritas penduduk dunia adalah umat beragama, mengapa agama belum menunjukkan peran signifikan dalam situasi merosotnya demokrasi? Padahal ada banyak masalah pelik sedang dihadapi umat manusia di masa ini seperti: ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran, perang, kerusakan lingkungan, dll. Ada beberapa hal secara kumulatif menjelaskan situasi ini yaitu:

### **1. Dampak sekularisasi di masa lalu**

Datangnya gelombang modernisme pada abad 17-18 membawa sistem politik yang memisahkan diri dari agama. (Magnis-Suseno, 2017) Ini tidak terlepas dari situasi kelam akibat hubungan tidak sehat antara politik dengan agama di masa sebelumnya. Modernitas secara umum sejak abad 17, muncul dalam sikap: “*mulai meragukan ketuhanan*”. (Sunarko, 2019) Ini mendorong terjadinya: *pemisahan antara agama dan politik*. (Sunarko, 2019) Agama dianggap ranah privat, dan tidak boleh dibawa ke ranah publik. Semua sistem yang berlaku di ranah publik, termasuk politik, dibebaskan dari “*campur tangan*” agama. Ada dua dampak akibat sekularisasi ini: 1. Sistem-sistem ekonomi, politik, dll yang berlaku di ranah publik menjadi bebas nilai, dan 2. Agama hanya bergerak kedalam.

Istilah “*post sekular*” yang merujuk dimulai sekitar abad 21, digunakan oleh filsuf Jerman Jurgen Habermas, untuk menggambarkan perkembangan baru dimana manusia mulai sadar akan keterbatasan, baik pada tradisi pencerahan yang dibawa modernisme dan pada tradisi agama. Karena itu, masyarakat post-sekular harus dimengerti sebagai “*hasil proses saling belajar antar keduanya*”. (Sunarko, 2019) Walau masyarakat masa ini, yang post sekular, telah membuka ruang bagi interaksi lebih luas antara politik dan agama, tetapi dampak sekularisme masih kuat berpengaruh dalam praktek agama dan politik masa ini.

### **2. Citra politik yang kotor**

Pengalaman beberapa dekade terakhir, telah membentuk “*wajah*” negatif politik masa ini sebagai: tempat rebutan kuasa, rebutan uang, aktualisasi kepentingan ego. Politik seakan telah menjadi sarana untuk mendapatkan kekayaan dan bukan lagi sarana untuk menata hidup dan kesejahteraan bersama. (SJ, 2013) Berbagai skandal kolusi, korupsi, kekerasan, intimidasi, persekusi, manipulasi, kebohongan, dan berbagai penyimpangan lain, dalam praktek politik telah tersingkap luas. Ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap politik. Praktik politik yang diwarnai konflik, kerusuhan, kekerasan, telah menakuti masyarakat. Merebaknya hasutan kebencian (*hate provocation*) yang menggabungkan hasutan kebencian (*hate speech*) dengan “*pelintiran kebencian*” (*hate spin*), telah menggelisahkan masyarakat. (Ali-Fauzi, 2019) Gambaran kotor politik, secara tidak langsung mendorong agama menjauh darinya. Citra agama yang agung dan suci, tentu tidak ingin dicemari dengan hal-hal yang kotor. Agama cenderung menjaga jarak dengan politik, sayangnya ini juga melemahkan karya agama itu sendiri.

### 3. *Tantangan agama di masa ini*

Dua psikiatri USA, Stephen Arterburn dan Jack Felton, memutuskan untuk meneliti maraknya fenomena penyimpangan praktek agama masa ini. Penyimpangan itu mereka istilahkan dengan: “*iman yang beracun*” (*toxic faith*) dan “*kecanduan agama*” (*religious addiction*). (Felton, 1991) Hasil penelitian mereka dipublikasikan dalam buku yang berjudul *Toxic Faith*. Fenomena “*iman yang beracun*” dan “*kecanduan agama*” didefinisikan sebagai kecenderungan perilaku orang beragama yang “*bersifat destruktif dan berbahaya karena utamanya tidak mengejar relasi dengan Allah tetapi menggunakan agama untuk mengontrol hidup orang lain*”. (Felton, 1991) Ada 10 karakteristik yang diidentifikasi dengan fenomena itu, yaitu perilaku beragama yang: (Felton, 1991) 1. Merasa diri lebih istimewa dibanding orang lain, 2. Bersikap otoriter dan diktator, 3. Mentalitas untuk mengelompokkan kawan-lawan, 4. Suka menghakimi yang berbeda, 5. Aktif luar biasa dalam pelayanan, 6. Pengikutnya menderita, 7. Komunikasi bersifat tertutup, 8. Aturan-aturan diselewengkan dengan dalih “*kehendak Tuhan*”, 9. Tidak ada keterbukaan obyektif (diskusi, dialog, dll), 10. Suka memberi label negatif pada yang tidak sepihak atau berbeda. Menurut penelitian, kecenderungan negatif ini sering berlangsung spontan, tanpa disadari. (Felton, 1991) Kecenderungan gerak kedalam yang tertutup ini, nampak selaras dengan dampak *post truth*, *epistemic bubbles*, *echo chambers*, politik identitas.

Pimpinan tertinggi Gereja Katolik masa ini, Paus Fransiskus, juga mengeluhkan fenomena fokus hanya pada gerak kedalam agama yang tidak sehat. Paus sampai merasa perlu menulis Seruan Apostolik *Evangelii Gaudium* (Sukacita Injil), pada tahun 2014, untuk menanggapi hal ini. Dalam seruan itu Paus menekankan perlunya pembaharuan atas keputusan Gereja “*untuk bergerak keluar*” (Fransiskus, 2014). Keluar dari zona nyaman ketempat-tempat yang membutuhkan terang Injil. Pentingnya perubahan ini dinyatakan Paus dengan: “*saya lebih menyukai Gereja yang memar, terluka, dan kotor karena telah keluar di jalan-jalan, daripada Gereja yang sakit karena menutup diri dan nyaman melekat pada rasa amannya sendiri*”. (Fransiskus, 2014) Lewat pernyataan ini, Paus menunjukkan bahwa gerak kedalam yang tidak diimbangi dengan gerak keluar secara seimbang, membuat agama menjadi “*sakit*”. “*sakit*” karena menolak sebagian perutusannya sendiri, dan menjadi tidak seimbang. Seruan apostolik ini disampaikan berdasarkan fakta mandulnya agama dalam menggarami kehidupan masyarakat. Menurut Paus

ini mengakibatkan umat beragama jatuh pada “*penekanan pada individualisme, krisis identitas, dan kendurnya semangat*”.(Fransiskus, 2014) Terjadi “*apatisme pastoral*” dan “*pragmatisme abu-abu*”, dimana semua kelihatan berlangsung secara normal, padahal kenyataan iman sedang melemah dan merosot menjadi kepicikan.(Fransiskus, 2014)

Nampak bahwa pada masa ini agama sedang berjuang menghadapi tantangannya sendiri, sehingga tidak cukup siap untuk berperan menolong demokrasi. Pengaruh buruk zaman ternyata telah kuat melemahkan kemampuan agama untuk berperan memperbaiki demokrasi. Umat beriman yang menjadi tulang punggung agama juga banyak terjebak dalam praktek politik identitas, *epistemic bubbles, post truth*, dll. Mereka juga mengalami ketidakadilan dan kebingungan akibat keberagaman disemua bagian kehidupannya. Para pemimpin agama juga tidak terlepas dari tantangan dunianya. Karenanya, agama pertama-tama perlu membaharui dan memberdayakan dirinya, untuk dapat berperan mengatasi tantangan zaman dan memperbaiki demokrasi.

## KESIMPULAN

Pembahasan-pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa modernitas yang mengusung tema pemisahan agama-politik, telah memberikan dampak negatif yang masih berlangsung hingga saat ini. Agama cenderung lebih berfokus pada “*gerak kedalam*”, seperti: konsolidasi internal, ritual, pembangunan sarana-sarana ibadah, dll. Fokus sepihak ini mengurangi kemampuan agama untuk “*menggarami atau menerangi*” masyarakat luas, termasuk didalamnya: praktik politik demokrasi. Akibatnya, demokrasi tergerus zaman, dan kehilangan kemampuan terbaiknya untuk menghasilkan “*kebaikan umum*”. Di lain pihak, demokrasi yang gagal memproduksi “*kebaikan umum*”, menghasilkan eksekusi buruk berupa bangkitnya penyakit-penyakit sosial masyarakat. Penyakit sosial ini berupa: politik identitas, egoisme sempit, keserakahan, maraknya *post truth*, fundamentalisme agama, dll. Masyarakat yang kurang mempercayai sistem politiknya sendiri, memunculkan anarkisme. Masyarakat yang “*sakit*”, nyatanya juga memberikan pengaruh dan tantangan kuat pada proses iman agama. Mayoritas umat beriman hidup ditengah dan dipengaruhi oleh situasi masyarakat. Tantangan yang berat ini makin melemahkan agama untuk mampu berperan memperbaiki demokrasi. Demikian seterusnya, membentuk lingkaran setan yang saling melemahkan dan destruktif.

Lingkaran setan ini perlu diputus dengan membangun kesadaran akan pentingnya kerjasama positif antara agama dan politik. Kedua kutub yang berjauhan ini perlu didekatkan dalam rangka memperbaiki dunia. Kedua belah pihak perlu makin membuka dan mendekatkan diri dalam dialog yang intens. Agama perlu membangkitkan kemampuannya untuk “bergerak keluar”, dengan aktif mendidik umatnya dalam memperbaiki demokrasi, berdialog dengan yang berbeda, dan membawa ajaran moralnya ke kehidupan masyarakat luas. Ini perlu dilakukan supaya nilai-nilai agama makin mampu menjiwai atau membimbing pelaksanaan demokrasi. Agama dan demokrasi tetap perlu menjaga jarak, tapi saling melengkapi. Agama menyuntikkan ajaran moral pada pelaku demokrasi, sementara demokrasi menjaga baik kelangsungan agama. Demokrasi diharapkan makin mampu menghasilkan “kebaikan umum”. Dan masyarakat yang hidup baik berkat demokrasi, mendukung proses iman umat agama ke tahap yang lebih dalam lagi. Dengan demikian, proses dapat membentuk “lingkaran kebaikan” bagi kehidupan manusia. Tidak ada resep instan untuk semua ini, melainkan perlu terus menerus direfleksikan dan diupayakan. Ini adalah panggilan untuk semua. Rakyat yang berdaulat dalam demokrasi, harus secara bersama dimampukan menyelamatkan diri, sesama, dan alam sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali-Fauzi, I. (Ed.). (2019). *Buku Panduan Melawan Hasutan dan Kebencian*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina.
- Amin Mudzakir, D. (2018). *Menghalau Ekstremisme, Konsep & Strategi Mengatasi Ekstremisme Kekerasan di Indonesia*. Wahid Foundation.
- Antonius Siwi Dharma Jati SJ, D. (2022). *Yesuit dan Muslim, Dinamika Kehadiran Yesuit Di Tengah Kaum Muslim di Indonesia*. Kanisius.
- Baur, A. (2021). *Gereja Online Mencari Solusi, Refleksi Hidup menggereja Masa Kini*. Obor.
- Felton, S. A. & J. (1991). *Toxic Faith, Understanding and Overcoming Religious Addiction*. Oliver – Nelson Books.
- Flood, A. (2016). “Post Truth” Named Word of The Year by Oxford Dictionaries. The Guardian.
- Fransiskus, P. (2014). *Evangelii Gaudium, Sukacita Injil*. Dokpen KWI.
- Fukuyama, F. (2020). *Identitas, Tuntutan Atas Martabat Dan Politik Kebencian*.

- Penerbit Bentang.
- Harari, Y. N. (2018). *21 Adab untuk Abad ke 21*. Global Indo Kreatif.
- Hardiman, F. B. (2013). *Dalam Moncong Oligarki, Skandal Demokrasi di Indonesia*. Kanisius.
- Hardiman, F. B. (2018). *Demokrasi Dan Sentimentalitas*. Kanisius.
- Haryatmoko. (2016). *Membongkar Rezim Kepastian, Pemikiran Kritis Post Strukturalis*. Kanisius.
- Herry-Priyono, B. (2022). *Kebebasan, Keadilan, dan kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is About*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Indonesia, V. (2022). *Biden Dorong RUU Aborsi Jelang Pemilu Paruh Waktu AS*. VOA INDONESIA. <https://www.voaindonesia.com/a/biden-dorong-ruu-aborsi-jelang-pemilu-paruh-waktu-as/6795814.html>
- Kelly, R. (2019). *Constructing Leadership 4.0, Swarm Leadership and the Fourth Industrial Revolution*. Palgrave Macmillan.
- Koller, J. M. (2010). *Filsafat Asia*. Ledarero.
- KWI. (2020). *Oeconomiae Et Pecuniariae Quaestiones, Masalah-masalah Ekonomi dan Keuangan*. Dokpen KWI.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka.
- Magnis-Suseno, F. (2017). *Katolik Itu Apa?, Sosok, Ajaran, Kesaksiannya*. Kanisius.
- Mahubani, K. (2020). *Has China Won?, The Chinese Challenge to American Primacy*. Hachette Book Group.
- OFM, A. E. K. O. W. C. (2014). *Multikulturalisme, Kekayaan dan Tantangannya di Indonesia*. Obor.
- Pr, M. J. L. (2022). *Berjalan Bersama, Dialog Bagi Gereja Katolik Hari Ini*. Kanisius.
- SJ, M. S. (2013). *Krisis Peradaban*. Kanisius.
- Sunarko, A. (2019). *Agama di Zaman Post Sekular: Tersingkir atau Mendominasi Politik*. STF Driyarkara.
- T. Krispurwana Cahyadi, S. (2006). *Katolik dan Politik*. Obor.
- Wahid, K. A. (2014). *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute, dan Maarif Institute.
- Zizek, S. (2020). *Pandemic, Covid 19 Shakes The World*. OR Books.